



SAKIP

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMSEL

TAHUN ANGGARAN 2025

OUTLINE

1. Gambaran Umum
2. Misi OPD
4. IKU DAN PK Perangkat Daerah
5. Realisasi IKU dan Perjanjian Kinerja
6. Penghargaan
7. Dokumentasi / Bukti Realisasi IKU dan PK
8. Tindak Lanjut LHE AKIP
9. Video Kegiatan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja PD + Penghargaan



TUPOKSI DINAS SOSIAL

Melaksanakan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan pemerintah Provinsi di Bidang Sosial.
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
(Pergub Nomor 43 Tahun 2016 Tentang SOTK Dinas Sosial dan Pergub Nomor 18 Tahun 2018 Tentang UPTD Dinas Sosial)

1

Sekretariat

4

Bidang

6

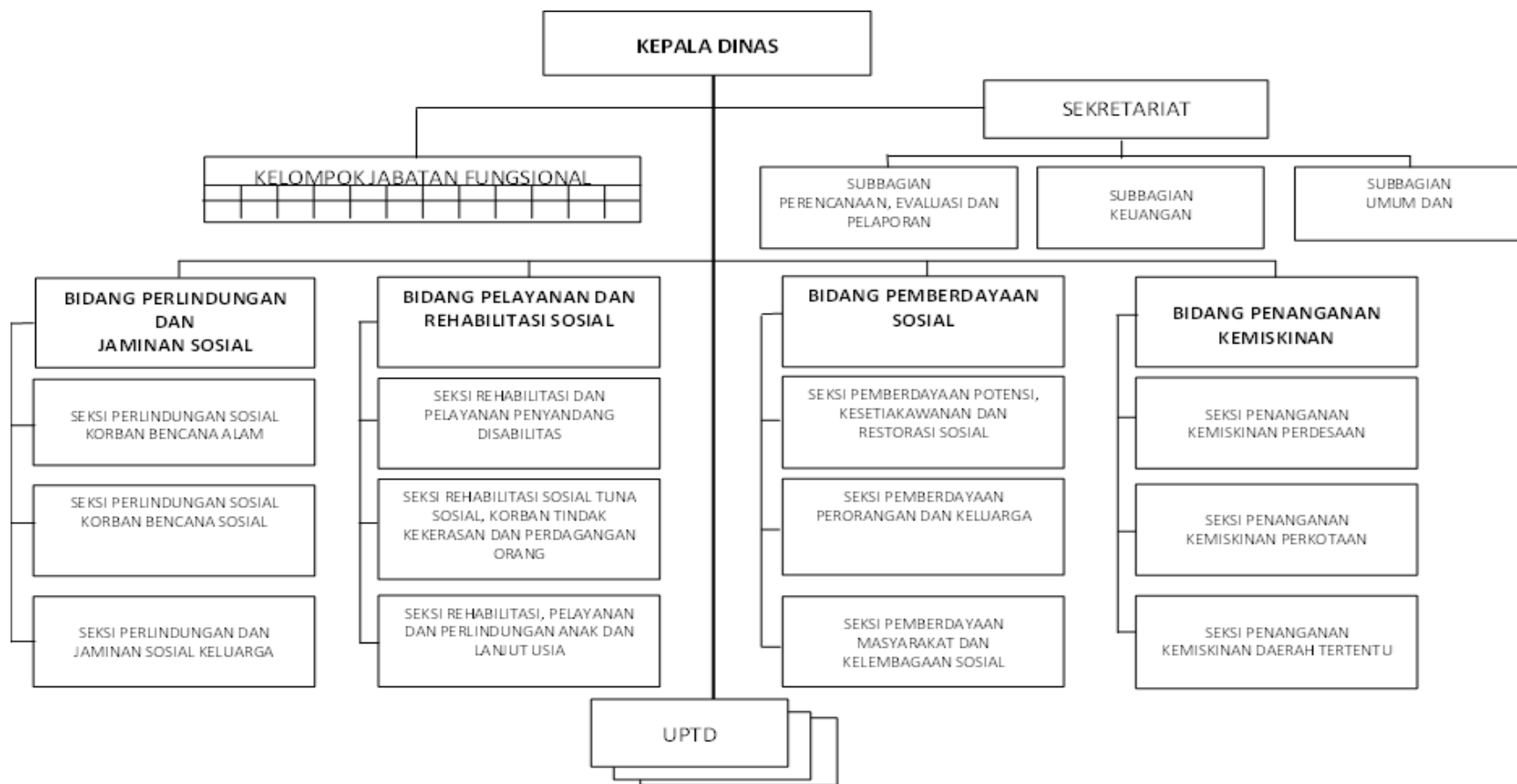
UPTD

12

Panti Sosial



SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL



POSISI / PERANAN DINAS SOSIAL DALAM RPJMD SUMSEL 2025 - 2029

Isi Dokumen RPJMD 2025 – 2029 yang berkaitan dengan Urusan Sosial

Visi

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Misi (5)

Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan

Tujuan (8)

Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Sasaran (8.2)

Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial

Indikator

Indikator : Indeks Kesejahteraan Sosial



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,22	57,63	100,72

Catatatan : Perhitungan mengenai Indeks Kesejahteraan Sosial baru mulai ditetapkan dalam RPJMD 2025 – 2029, selain itu Perhitunganya juga baru mulai dilakukan oleh Kementerian sosial.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Kinerja Tahun 2025

NO	KEGIATAN	JUMLAH	KET
1	Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi disabilitas di dalam panti	25 KPM	
2	Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Anak membutuhkan perlindungan khusus di dalam panti	130 KPM	
3	Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia di dalam panti	200 KPM	
4	Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Gelandangan, Pengemis dan ODGJ di dalam panti	80 KPM	
5	Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Wanita Rawan Tuna Sosial di dalam panti	50 KPM	
6	Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Anak berhadapan dengan hukum di dalam panti	50 KPM	
7	Bantuan Bagi Korban Bencana	5.091 KPM	
8	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	1.500 KPM	
9	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan dasar Bagi Lansia dalam Rangka Kampanye Sosial Lansia Tahun 2025	50 KPM	
10	Penyediaan Alat Bantu bagi Lanjut Usia	27 KPM	
11	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan dasar Bagi Anak dalam Rangka Perlindungan Sosial Anak di Sumatera Selatan Tahun 2025	50 KPM	
12	Bantuan Penyediaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas	31 KPM	
13	Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Penyandang Disabilitas/Keluarga Penyandang Disabilitas	15 KPM	
14	Bantuan bagi Veteran	140 KPM	

Perjanjian Kinerja 2026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS SOSIAL

Jl. Kapten Arsitek Soekris Tedyatma, 311512 - 310274 Fax (0711) 510285 PG. BOX 1432
PALEMBANG - 30129
Website : www.diprov.sumatrasosial.go.id Email : dinasprovsumatrasosial@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Achmad Tarmizi, Ph.D
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H.Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua,
Gubernur Sumatera Selatan

H.Herman Deru

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan

Prof. Dr. H. Achmad Tarmizi, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19660609 1995121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,32
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel	Nilai Sakip	Nilai	81,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 23.721.171.542	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 300.000.000	APBD
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 35.000.000	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 8.058.120.000	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 519.390.000	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 709.000.000	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 284.000.000	APBD

Palembang, 21 Januari 2026

Gubernur Sumatera Selatan,

H.Herman Deru

Plt. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan,

Prof. Dr. H. Achmad Tarmizi, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19660609 199512 1001

PENGHARGAAN YANG DI TERIMA



TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2025

No.	REKOMENDASI	KOMPONEN PADA SAKIP	RENCANA AKSI	LANGKAH KERJA	OUTPUT / HASIL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KET
1	Menyusun peta keterkaitan antar-OPD (Crosscutting Mapping) pada pohon kinerja sehingga terlihat hubungan kontribusi, kolaborasi dan peran masing-masing OPD dalam mendukung pencapaian sasaran	Perencanaan Kinerja	Penyusunan Dokumen Crosscutting Mapping	Mengidentifikasi sasaran RPJMD yang menjadi kontribusi Dinas Sosial	Dokumen Crosscutting Mapping	Sekretariat / Subbag Perencanaan	
				Menginventarisasi OPD yang memiliki sasaran serupa; Menyusun matriks keterkaitan sasaran dan indikator antar OPD			
				Menyusun Matriks keterkaitan sasaran dan indikator antar OPD			
			Integrasi Crosscutting ke dalam pohon kinerja	Merevisi pohon kinerja dengan memasukkan peran lintas OPD	Pohon Kinerja Terintegrasi	Sekretaris	
2	Menyusun dan menetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang baku dan terdokumentasi	Pengukuran Kinerja	Penyusunan SOP Pengumpulan Data	Mengidentifikasi seluruh IKU; Menentukan sumber data	SOP Pengumpulan Data Kinerja	Subbag Perencanaan	
				Menyusun prosedur pengumpulan dan validasi			
				Menetapkan SOP melalui SK Kepala Dinas			
				Mengidentifikasi seluruh IKU; Menentukan sumber data; Menyusun prosedur pengumpulan dan validasi; Menetapkan SOP melalui SK Kepala Dinas			
			Penyusunan template pelaporan IKU	Menyusun format baku pelaporan indikator; Menyampaikan template kepada seluruh bidang	Template Pelaporan IKU	Perencana	
			Penguatan kapasitas pengelola data	Melaksanakan bimbingan teknis internal pengelolaan data kinerja	Materi dan Daftar Hadir Bimtek	Sekretariat	

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2025

No.	REKOMENDASI	KOMPONEN PADA SAKIP	RENCANA AKSI	LANGKAH KERJA	OUTPUT / HASIL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KET
3	Meningkatkan kualitas proses pengukuran kinerja dengan memastikan seluruh Indikator Utama diukur secara konsisten, akurat dan tepat waktu sesuai pedoman pengolahan kinerja	Pengukuran Kinerja	Penyusunan Kalender Pengukuran Kinerja	Menyusun Jadwal Pengukuran Tahunan dan Triwulan	Kalender Pengukuran	Subbag Perencanaan	
			Pelaksanaan Monitoring Triwulan	Mengumpulkan Data Capaian setiap Triwulan	Laporan Monitoring Triwulan	Seluruh Bidang	
				Menyusun Laporan Capaian dan Deviasi			
			Analisis Tren Capaian	Membandingkan Capaian dengan Target dan Tren 3 Tahun Terakhir	Dokumen Analisis Tren	Perencana	
4	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan, serta penyusunan rencana tindak lanjut guna mewujudkan hasil (Outcome) yang berkesinambungan	Pengukuran Kinerja	Integrasi Hasil Pengukuran dalam Rapat Pimpinan	Menyajikan hasil capaian dalam rapat; Mengidentifikasi indikator yang tidak tercapai	Notulen Rapat	Sekretariat	
			Penyusunan Rencana Perbaikan Kinerja	Menganalisis penyebab deviasi; Menetapkan langkah korektif program	Dokumen RTL Kinerja	Kepala Bidang	
			Penyesuaian Strategi Pelaksanaan Program	Melakukan revisi strategi pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi	Dokumen Penyesuaian Strategi	Kepala Dinas	
5	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya pengukuran kinerja, melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan serta Internalisasi budaya kinerja di lingkungan unit kerja	Pengukuran Kinerja	Melakukan sosialisasi terhadap seluruh pegawai Dinas Sosial terkait dengan pentingnya pengukuran kinerja	1.Menyusun dan menyiapkan materi terkait laporan kinerja 2.Menetapkan jadwal dan pelaksanaan Sosialisasi 3.Mendokumentasikan hasil kegiatan dan menindaklanjuti hasil rapat.	Laporan Sosialisasi	Sekretariat / Subbag Perencanaan	

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2025

No.	REKOMENDASI	KOMPONEN PADA SAKIP	RENCANA AKSI	LANGKAH KERJA	OUTPUT / HASIL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KET
6	Melakukan reviu internal terhadap dokumen Laporan Kinerja oleh pejabat yang berwenang sebelum laporan disampaikan kepada Sekretariat Daerah, guna memastikan keandalan dan akurasi data kinerja yang dilaporkan	Pelaporan Kinerja	Pembentukan Tim Review LKJIP	Menetapkan Tim melalui SK Kepala Dinas	SK Tim Reviu	Kepala Dinas	
			Pelaksanaan Review Internal	Melakukan pengujian konsistensi data dan validitas dokumen pendukung	Kertas Kerja Reviu	Tim Review	
			Finalisasi Laporan	Melakukan perbaikan dan finalisasi LKJIP sebelum disampaikan	LKJIP Final	Tim LKJIP	
7	Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam Laporan Kinerja dengan memuat analisis atas tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian indikator kinerja serta efesiensi penggunaan sumber daya (input) terhadap hasil yang dicapai (output/outcome)	Pelaporan Kinerja	Penyusunan Analisis Sebab - Akibat	Menganalisis faktor internal dan eksternal capaian indikator	Dokumen Analisis	Perencana	
			Analisis Efisiensi Anggaran	Membandingkan realisasi anggaran dengan capaian outcome	Analisis Efisiensi	Perencana	
			Penyajian Tren 3 Tahun	Menyusun grafik tren capaian indikator	Grafik Tren Kinerja	Sekretariat	
8	Mengoptimalkan penggunaan informasi dalam laporan kinerja berkala untuk melakukan penyesuaian terhadap aktivitas dan strategi pelaksanaan program/kegiatan agar capaian kinerja dapat lebih optimal.	Pelaporan Kinerja	Menyusun sistem yang dapat meningkatkan capaian kinerja yang lebih optimal	1.Menganalisis sistem/informasi yang selama ini digunakan 2.Menyusun dokumen SOP baru yang dapat meningkatkan kinerja	Dokumen SOP	Sekretariat	

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2025

No.	REKOMENDASI	KOMPONEN PADA SAKIP	RENCANA AKSI	LANGKAH KERJA	OUTPUT / HASIL	UNIT PENANGGUNGJAWAB	KET
9	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi APIP tahun sebelumnya dengan menyusun rencana aksi (Action plan) yang memuat langkah - langkah penanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian	Evaluasi Kinerja	Penyusunan Register RTL	Menginventarisasi seluruh rekomendasi dan menyusun matriks RTL	Register RTL	Sekretariat	
			Monitoring Progres RTL	Memantau Progres Penyelesaian Setiap Bulan	Laporan Progres	Sekretariat	
10	Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) agar hasil monev tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga digunakan untuk analisis kinerja, pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.	Evaluasi Kinerja	Penyusunan Pedoman Monev Internal	Menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi berbasis Kinerja	Pedoman Monev	Sekretariat	
			Pelaksanaan Monev Semesteran	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara Semesteran	Laporan Monev Semester	Tim Monev	

Croscuting dengan OPD Lain



Contoh Crosscutting dengan OPD lain dalam pencapaian Sasaran Kinerja

Strategi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sumatera Selatan

CASCADING KEMISKINAN EKSTREM



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



Logical framework (logframe) ini dikembangkan dari tiga (3) Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yaitu Pengurangan Beban Pengeluaran, Peningkatan Pendapatan, dan Penurunan Kantong-Kantong Kemiskinan

STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENGURANGAN BEBAN

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lansia Terlantar didalam panti
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Disabilitas Terlantar Dalam Panti
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Anak Terlantar didalam panti
4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Gepeng dan ODGJ Terlantar Dalam Panti
5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana Alam & Sosial
6. Pemulangan Bagi orang Terlantar
7. Home Care (Bantuan Kebutuhan Pokok bagi lansia) diluar panti
8. Bantuan Alat Bantu bagi penyandang Disabilitas

PENINGKATAN PENDAPATAN

1. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi warga miskin
2. Bimbingan & Pelatihan bagi Wanita Rawan Tuna Sosial
3. Bimbingan & Pelatihan bagi Anak Berhadapan dengan hukum /anak nakal
4. Bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas
5. Bimbingan & Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas

PERBAIKAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL (DTsen)

1. Bimbingan dan Pelatihan Pengelolaan Data DTsen Bagi Operator Kabupaten/Kota
2. Evaluasi pelaksanaan pemutahiran data DTsen di Kabupaten/Kota
3. Evaluasi Data Penerima bantuan yang tidak sesuai (Data Ganda dll)
4. Pemutakhiran DTsen merupakan Kewenangan Dinsos Kab/Kota

ALOKASI ANGGARAN PENANGANAN KEMISKINAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		2026	KET
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.058.120.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	524.885.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	1.520.775.000	
	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant	2.506.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	2.264.950.000	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya si Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	1.241.510.000	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL	519.390.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	519.390.000	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI	709.000.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kewenangan Provinsi	709.000.000	
4	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORAN TINDAK KEKERASAN	35.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	35.000.000	
JUMLAH		9.321.510.000	

KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA DENGAN PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN

No	Indikator Kinerja	Kaitan dengan Strategi Penanganan Kemiskinan
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Pengurangan Beban dan Peningkatan Pendapatan
2	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Pengurangan Beban dan Peningkatan Pendapatan
3	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pengurangan Beban dan Peningkatan Pendapatan
4	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Pengurangan Beban dan Peningkatan Pendapatan
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Pengurangan Beban dan Peningkatan Pendapatan
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Pengurangan Beban
7	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Pengurangan Beban
8	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Pengurangan Beban

FOTO KEGIATAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif



FOTO KEGIATAN

BIMBINGAN PELATIHAN / KETERAMPILAN

BAGI ANAK YG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS



Pemberian Menjahit

FOTO KEGIATAN

BIMBINGAN KETERAMPILAN / PELATIHAN

BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM / ANAK PUTUS SEKOLAH

Pemberian Pelatihan Las dan Montir



FOTO KEGIATAN BIMBINGAN KETRAMPILAN BAGI WANITA RAWAN TUNA SOSIAL

Pemberian Pelatihan Salon dan Menjahit



FOTO KEGIATAN BIMBINGAN KETERAMPILAN BAGI DISABILITAS SENSORIK

Pemberian Pelatihan Komputer dan Kerajinan



FOTO KEGIATAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana





SAKIP

DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

*Thank
you*